

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sebab tujuan utama dari pembentukan negara belum terwujud seutuhnya apalagi di daerah- daerah terpencil di Indonesia yang kurang dijamah oleh teknologi dan dorongan dari pemerintahan pusat.

Sedangkan untuk kemajuan ekonomi rakyat itu sendiri peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangatlah menentukan untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi insentif agar pelaku ekonomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingan sendiri tanpa mengabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Harus diapresiasi bahwa pelaku ekonomilah yang menciptakan kekayaan sebuah negara melalui proses produksi, distribusi, perdagangan yang selain memperkerjakan tenaga kerja, juga membayar pajak langsung maupun tidak langsung. Pelaku ekonomi, melalui perilaku *entrepreneurial*-nya yang menciptakan nilai tambah ekonomi atau *economic volue added* yang menjadi sumber kekayaan sebuah negara.²

¹ Tanri Abeng, *Bumr Badan Usaha Milik Rakyat, Lembaga Pelaku Ekonomi Dan Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2015), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

Untuk itu pemerintah dan rakyat saling besinergi untuk meningkatkan ekonomi negara melalui usaha rakyat yang kemudian didukung oleh pemerintahan, agar ekonomi kerakyatan mengalami peningkatan yang kemudian berpengaruh besar terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998.

Pemerintah bertekad melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Dalam era globalisasi, semakin modern kehidupan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Tinggal bagaimana suatu negara menyusun strategi sistem ekonomi negara mereka. Kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik negara itu sendiri, jika politik suatu negara baik maka sistem

perekonomiannya pun akan baik dan akan diakui oleh pihak internasional dari kebijakan-kebijakan yang dilakukannya.

Tetapi, jika negara keadaan politiknya buruk maka tidak akan ada rasa aman sehingga perekonomiannya pun akan sangat tidak sehat dan para investor pun akan takut untuk berbisnis di suatu negara yang tidak aman dengan sistem politik yang kacau. Karena semakin maju, maka persaingan dalam dunia politik dan perekonomian pun semakin tinggi. Semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih untuk kesejahteraannya tanpa memperdulikan orang lain yang ada disekitarnya. Tinggal bagaimana suatu negara membuat suatu sistem perekonomian yang bisa berkembang ditengah era globalisasi ini dengan bisa menyejahterakan semua rakyatnya.

Salah satu upaya dari meningkatkan kesejahteraan rakyat ialah dengan partisipasi ataupun dukungan langsung dari pemerintah untuk rakyat dengan pembinaan dan pemberdayaan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan konsep korporatisasi koperasi dan usah mikro kecil menengah dengan setatus hukum, struktur, dan kedudukan, yang sama dan sejajar dengan lembaga pelaku ekonomi lainnya. Kesejahteraan ini juga terefleksi dari kekuatan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang memiliki usaha produktif yang berskala ekonomi, berorientasi pasar, efisien sebagaimana layaknya korporasi modren yang dikelola secara profesional sehingga dapat mendukung usaha rakyat.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2012 menunjukkan struktur kelembagaan pelaku ekonomi nasional yang sangat tidak

berimbang, jumlah total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 65. 534. 592 berbanding 4. 968 usaha besar atau 99, 99% berbanding 0,01%. Penyerapan tenaga kerja langsung 107. 657. 509 (97,2%) berbanding 3. 150. 645 (2,8%). Kalaupun diumpamakan rata-rata usaha besar memperkerjakan tenaga kerja tidak langsung sepuluh kali tenaga kerja langsung, perimbangan kontribusi terhadap total pekerja masih 25% berbanding 75% untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebaliknya total ekspor non-migas usaha besar menguasai 86%, sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya mendapat porsi 14%.³

Ironisnya, sistem ekonomi dan keuangan lebih mendukung usaha besar memperkaya yang besar dan meninggalkan yang kecil, semakin maju usaha-usaha besar, semakin mudah pula memperoleh pendanaan dari sumber manapun, termasuk dari publik, sebaliknya semakin kecil dan kerdil usaha mikro, apalagi yang masih baru, akan semakin dijauhi oleh lembaga-lembaga keuangan termasuk dari bank pemerintah. Inilah yang mejadi alasan kenapa usaha mikro yang jumlahnya 55,8 juta, atau 98,8% dari seluruh unit usaha nasional tetap berada di bawah sehingga tidak mengalami kemajuan, salah satu bentuk usaha mikro ialah home industri yang memang merupakan usaha dari rakyat sendiri yang dibentuk dan didirikan oleh rakyat yang tentunya masih membutuhkan bantuan dan dorongan dari pemerintah untuk perkembangannya.

Home industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu

³ *Ibid.*, hlm. 20-21.

atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan perusahaan besar pada umumnya.⁴ Jumlah tenaga kerja rata-rata 5-10 orang.⁵

Dalam hal ini tentunya peran dari pemerintahan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangatlah penting dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat melalui lembaga lembaga seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), UMKM dll, khusus untuk mengelola usah kecil menengah yang berpotensi dalam meningkatkan usaha rakyat karena sejatinya lembaga ini didirikan dan dibentuk untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, Kementerian Koperasi dan Usah Kecil Menengah seharusnya bisa berperan secara maksimal untuk mendukung dan membina usaha kecil milik rakyat. Dari ulasan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Peranan Koperasi dan Usah Kecil Menengah UKM Dalam Pemberdayaan Home Industri Olahan Kripik Singkong DD Bersaudara di Desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

⁴ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha Di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

1. Apa saja upaya dan peranan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan dari home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara maupun dari Dinas Koperasi dan UKM tersebut?

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami isi tulisan ini maka penulis membatasi dengan beberapa istilah-istialah yang perlu dijelaskan sesuai dengan maksud dari penelitian ini:

1. UMKM adalah: usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh undang-undang, dengan modal awal sekitar Rp. 300.000.000,00 dan minimal 30 orang tenaga kerja sedangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki pengertian yang sama tapi dengan tingkatan yang lebih rendah dengan modal awal sekitar Rp. 50.000.000,00 dan minimal 5 orang tenaga kerja, hal ini merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁶

⁶<https://Koperasi.Kulonprogokab.Go.Id/Detail/113/Kriteria-Usaha-Mikro-Kecil-Dan-Menengah-Menurut-Uu-No-20-Tahun-2008-Tentang-Umkm>. Diakses Tanggal: 25 Maret 2021, Pukul: 09.32 Wib.

2. Ekonomi Kerakyatan adalah: suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan cara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk pada pasal 33 UUD 1945, dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.⁷
3. Home Industry adalah: *Home* berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman.⁸ Sedang *Industry*, dapat diartikan sebagai kerajinan,⁹ usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah.¹⁰ Usaha di rumah yakni tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan.
4. Rakyat adalah: warga masyarakat, segenap penduduk yang menempati wilayah tertentu yang merupakan bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan.¹¹ Rakyat terdiri dari beberapa orang yang memiliki idiologi yang

⁷[Http://Pmi.Uinsu.Ac.Id/Berita/Read/129/Ekonomi-Kerakyatan-Berbasis-Potensi-Lokal.Html](http://Pmi.Uinsu.Ac.Id/Berita/Read/129/Ekonomi-Kerakyatan-Berbasis-Potensi-Lokal.Html).

Diakses Tanggal: 25 Maret 2021, Pukul: 09.40 Wib.

⁸ Staf Bahasa Infra, *Kamus Super Lengkap Bahasa Lengkap*, (Jakarta: Infra Pustaka, 2013), hlm. 61.

⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 71.

¹¹ Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serba Jaya, 2020), hlm. 518.

sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

5. Peranan adalah: merupakan aspek dinamis kedudukan (status) ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.¹²

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja upaya dan peranan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi permasalahan dari home industri olahan kripik singkong DD Bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara maupun dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm. 243.

1. Secara Akademis

Menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca, menambah wawasan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan masukan bagi peneliti lain, khususnya terhadap pihak-pihak terkait yang meneliti masalah ini lebih dalam lagi, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam memberikan kebijakan dan kontribusi maupun peranan terhadap permasalahan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang di tulis secara sistematis agar dapat memberi pemahaman dan mudah untuk dimengerti.

BAB I: pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: pembahasan terdiri dari landasan teori dari peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam pemberdayaan home industri olahan kripik singkong DD bersaudara di desa Terutung Payung Kab. Aceh Tenggara.

BAB III: metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengecekan ke afsahan data.

BAB IV : hasil dari penelitian dan temuan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN